



**SISTEM PENGAWASAN PERS DI INDONESIA PADA MASA  
DEMOKRASI TERPIMPIN 1959–1965**

**Skripsi**

**Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata-1 dalam Ilmu Sejarah**

**Disusun Oleh:**

**Olga S. Pratama**

**NIM 13030114140072**

**FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS DIPONEGORO**

**SEMARANG**

**2018**

## **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Dengan ini saya, Olga S. Pratama, menyatakan bahwa karya skripsi ini adalah asli hasil karya saya sendiri dan karya ilmiah ini belum pernah diajukan sebagai pemenuhan persyaratan untuk memperoleh gelar kesarjanaan baik Strata Satu (S1), Strata Dua (S2), maupun StrataTiga (S3) pada Universitas Diponegoro maupun perguruan tinggi lain.

Semua informasi yang dimuat dalam karya ilmiah ini yang berasal dari penulis lain baik yang dipublikasikan maupun tidak telah diberikan penghargaan dengan mengutip nama sumber penulis secara benar dan semua isi dari skripsi ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya pribadi sebagai penulis.

Semarang, September 2018

Penulis,

Olga S. Pratama

NIM 13030114140072

## ***MOTTO DAN PERSEMBAHAN***

“Hidup ini seperti sepeda, agar tetap seimbang kau harus tetap bergerak”.

-Albert Einstein-

“Setiap hasil yang didapatkan, selalu ada proses yang menentukan.”

-Penulis-

Dipersembahkan untuk:

Mamak, Papa dan orang-orang yang akan  
membaca skripsi ini.

Disetujui,  
Dosen Pembimbing,

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large initial 'I' followed by a series of loops and a final flourish.

Dr. Indriyanto S.H., M. Hum.  
NIP 196407111990011001

Skripsi dengan judul "Sistem Pengawasan Pers Di Indonesia pada Masa Demokrasi Terpimpin 1959-1965" yang disusun oleh Olga S. Pratama (NIM 13030114140072) telah diterima dan disahkan oleh panitia ujian skripsi Program Strata-I Departemen Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro pada hari Selasa, September 2018.

Ketua,



Prof. Dr. Dewi Yuliati, M.A.  
NIP 195407251986032001

Anggota I,



Dr. Indriyanto, S.H., M. Hum.  
NIP 196407111990011001

Anggota II,



Prof. Dr. Sutejo K. Widodo, M.Si.,  
NIP196005151985031004

Anggota III,



Dr. Dhanang Respati Puguh, M. Hum.  
NIP 196808291998031001

Mengesahkan,



Dr. Redyanto Noor, M.Hum.  
NIP 195903071986031002

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas berkat, rahmat dan hidayah-Nya lah penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Sistem Pengawasan Pers di Indonesia pada Masa Demokrasi Terpimpin 1959-1965”, yang penulis susun sebagai salah satu syarat kelulusan guna memperoleh gelar Sarjana (Strata-1) pada Departemen Sejarah, Fakultas Ilmu Budaya (FIB), Universitas Diponegoro, Semarang.

Penulis menyadari bahwa dengan segala keterbatasan yang ada, skripsi ini tidak akan berhasil disusun tanpa adanya bantuan, dukungan, serta doa dari berbagai pihak. Oleh karenanya, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada, yang penulis hormati: Dr. Redyanto Noor, M. Hum., selaku Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro, dan Dr. Dhanang Respati Puguh, M. Hum., selaku Ketua Departemen Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro, yang telah berkenan memberikan izin dan kemudahan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini. Penulis juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Dr. Indriyanto, S.H., M. Hum., selaku dosen pembimbing yang telah dengan sabar berkenan untuk memberikan bimbingan, keluasan wawasan, motivasi, serta kemudahan bagi penulis sehingga skripsi ini dapat tersusun sebagaimana sekarang ini. Segala hal yang baik dalam skripsi ini tak lepas dari kontribusi besar beliau.

Penulis juga menyampaikan terima kasih kepada Prof. Dr. Singgih Tri Sulistiyono, M. Hum., selaku dosen wali penulis, yang telah memberikan perhatian kepada penulis selama perkuliahan ini. Terima kasih yang sebesar-besarnya juga penulis ucapkan kepada segenap dosen-dosen di Departemen Sejarah, Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro, yang telah berkenan memberikan pelajaran intelektual, motivasi, inspirasi, serta pengalaman yang sangat berharga dalam membentuk dan mengembangkan kepribadian penulis selama menjadi mahasiswa di departemen ini, terutama untuk segenap dosen penguji: Prof. Dr. Dewi Yuliati, M.A., Prof. Dr. Sutejo K. Widodo, M.Si., serta Dhanang Respati Puguh, M. Hum., yang telah berkenan untuk memberikan saran dan kritikan yang membangun dalam proses pengujian skripsi ini. Ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya penulis sampaikan kepada segenap karyawan baik di Departemen Sejarah maupun di dalam lingkup Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro, khususnya untuk Mbak Fatma, Mas Oscar, dan Pak Romli, yang telah berkontribusi besar terhadap kelancaran studi penulis selama ini.

Ucapan terima kasih penulis haturkan pula kepada pihak-pihak Perpustakaan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) yang telah

banyak membantu penulis dalam proses pengumpulan sumber-sumber yang berkaitan dengan pers pada masa Demokrasi Terpimpin.

Penulis juga ingin menghaturkan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah menemani, memotivasi, serta memberikan kontribusi yang besar terhadap penulis selama proses perkuliahan hingga penulisan skripsi berlangsung, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di departemen ini. Rasa terima kasih dan hormat penulis tujukan untuk Bapak dan Ibu Haris, yang telah menyediakan rumah kos yang kondusif dan nyaman sebagai tempat menetap penulis selama di Semarang sejak menjadi Mahasiswa Baru. Kemudian untuk teman-teman yang telah mengisi hari-hari penulis selama ini, khususnya untuk Tomi Jepisa, Qory Dwiky Sandika, Herbanoe Rangga Y, dan Azwin Rashif Al Asyfhani, yang telah penulis anggap lebih dari sekadar teman bercerita serta teman berbagi keluh kesah selama perkuliahan, mereka yang sudah penulis anggap sebagai keluarga.

Tidak kalah pentingnya juga penulis sampaikan rasa terima kasih kepada teman-teman yang telah hadir dalam hidup penulis selama masa perkuliahan, seluruh teman-teman di Departemen Sejarah Undip, khususnya angkatan 2014; Akbar Ridwan, Galang Pijar Tri Pangestu, Maulida Alfi Hasanah, Muhammad Fijar Lazuardi, Daniel Aprildo Panggabean, Putro Adjie Pratomo, Dian Eka Sasmita, M. Imaduddin, Aditya Ray Muhammad, segenap teman-teman di kelas C, serta seluruh teman-teman satu angkatan yang tentu tidak dapat penulis tuliskan satu per satu, ucapan terima kasih dan rasa hormat penulis sampaikan. Tidak lupa juga ucapan terima kasih penulis tujukan kepada kakak-kakak tingkat Sejarah 2012 maupun 2013 yang sudah banyak memberi saran dan masukan selama ini, serta adik-adik Sejarah 2015, 2016, dan 2017 yang ikut memberi dukungan dan semangat kepada penulis selama menyelesaikan skripsi.

Selanjutnya, penulis mengucapkan terima kasih kepada Wilujeng Diah A, Zulfa Safitri, Ulya Sanny, Anang Rizal, Ellysa Ardiani, Al Mar'a Meidiana, Anisa Nur Sadrina, Elsa Gita Ginting, Dhini Lestari, Adlin Maulavan, Aldito G. Jarmananda, Satrio Maulana P, dan Oktaviasari Intan P, yang telah memberikan semangat, motivasi, membantu dalam pencarian sumber dan menemani penulis selama proses pengerjaan skripsi.

Terakhir, namun yang paling penting, ucapan terima kasih dan rasa sayang yang tak berujung penulis sampaikan untuk segenap keluarga penulis, untuk Papa dan Mamak penulis, Syahril dan Nurbaiti, yang selalu ada dalam apa pun keadaan dan situasi penulis, yang dengan doa, restu, serta motivasi mereka lah penulis dapat berada di titik ini, dan melangkah sampai sejauh ini. Semoga penulis bisa terus menjadi anak yang dapat membanggakan dan membahagiakan beliau berdua, baik di dunia maupun di akhirat nanti.

Sebagai peneliti pemula, skripsi ini tentu tidak luput dari kesalahan. Oleh karena itu, semua saran dan kritik dari pembaca sangat penulis harapkan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kepentingan akademik dan pembelajaran serta bagi manusia-manusia yang haus ilmu pengetahuan.

Semarang, September 2018

Penulis



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b>	i
<b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b>	ii
<b>HALAMAN <i>MOTTO</i> DAN PERSEMBAHAN</b>	iii
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b>	iv
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b>	v
<b>KATA PENGANTAR</b>	vi
<b>DAFTAR ISI</b>	ix
<b>DAFTAR SINGKATAN</b>	xi
<b>DAFTAR ISTILAH</b>	xiii
<b>DAFTAR GAMBAR</b>	xv
<b>DAFTAR TABEL</b>	xvi
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b>	xvii
<b>ABSTRAK</b>	xviii
<b><i>ABSTRACT</i></b>	xix
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang dan Permasalahan	1
B. Ruang Lingkup	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Tinjauan Pustaka	8
E. Kerangka Pemikiran	14
F. Metode Penelitian	18
G. Sistematika Penelitian	20
<b>BAB II PERS PADA MASA DEMOKRASI TERPIMPIN</b>	
A. Lahirnya Pers Terpimpin	22
1. Masa Transisi	22
2. Pembentukan Pers Terpimpin	24
B. Jenis – Jenis Pers	29
1. Pers Partai	29
2. Pers Independen	30
3. Pers Afiliasi	31
C. Karakter Pers Masa Demokrasi Terpimpin	35
D. Sirkulasi Surat Kabar	39
E. <i>Trending Topic</i> Pemberitaan Pers	44
1. Tri Komando Rakyat dan Pembebasan Irian Barat	44
2. Sukarelawan Kalimantan Utara dan Ganyang Malaysia	46
3. Pembubaran Badan Pendukung Sukarnoisme dan Partai Murba	48

**BAB III PENGAWASAN TERHADAP PERS PADA MASA DEMOKRASI TERPIMPIN**

A.	Landasan Pengawasan Pers	51
B.	Bentuk Pengawasan terhadap Pers	68
	1. Surat Izin Terbit	68
	2. Pengawasan Berdasarkan Isi Berita	70
C.	Realisasi Pengawasan	73
	1. Pelaksanaan Pembinaan Pers	73
	2. Pemberian Izin Terbit Kembali	77
	3. Hak Mengikuti dan Akibat Melanggar	80
D.	Pers Pendukung Sukarno dan Demokrasi Terpimpin	82
	1. Terbentuknya Badan Pendukung Sukarnoisme	82
	2. Jatuhnya Badan Pendukung Sukarnoisme	85
	3. Pemberedelan terhadap Pers Badan Pendukung Sukarnoisme	90

**BAB IV DAMPAK PENGAWASAN PERS PADA MASA DEMOKRASI TERPIMPIN**

A.	Pembredelan Pers Cina	93
B.	Pendeknya Umur Surat Kabar	102
C.	Surat Izin Pembelian Kertas dan Subsidi Surat Kabar	110
	1. Pemberian Izin Pembelian Kertas Surat Kabar	111
	2. Subsidi Kertas Koran	115
D.	Pers Harus Menyebarkan Ajaran Bung Karno	118

**BAB V SIMPULAN** 123

**DAFTAR PUSTAKA** 125

**LAMPIRAN** 129

## DAFTAR SINGKATAN

ABRI	: Angkatan Bersenjata Republik Indonesia
BPS	: Badan Pendukung Sukarnoisme
CIA	: <i>Central Intelligence Agency</i>
C&F	: <i>Cost and Fright</i>
Depernas	: Dewan Perencanaan Nasional
Dekon	: Deklarasi Ekonomi
Gestapu	: Gerakan 30 September
Kasab	: Kepala Staf Angkatan Bersenjata
KOTI	: Komando Operasi Tertinggi
Kotrar	: Komando Tertinggi Retooling Alat Revolusi
Manipol	: Manifesto Politik
Masyumi	: Majelis Syuro Muslimin Indonesia
Menpan	: Menteri Penerangan
Nasakom	: Nasionalisme, Agama, dan Komunisme
NU	: Nahdlatul Ulama
Pangad	: Panglima Angkatan Darat
Pangak	: Panglima Angkatan Kepolisian
Pangal	: Panglima Angkatan Laut
Pangau	: Panglima Angkatan Udara
PBB	: Perserikatan Bangsa-Bangsa

Penpres	: Penetapan Presiden
Peperti	: Penguasa Perang Tertinggi
PIA	: Pers Biro Indonesia
PKI	: Partai Komunis Indonesia
PNI	: Partai Nasional Indonesia
PWI	: Persatuan Wartawan Indonesia
RRI	: Radio Republik Indonesia
SOB	: <i>Staat van Oorlog en Beleg</i>
SIPK	: Surat Izin Pembelian Kertas
SPS	: Serikat Penerbit Surat kabar
SPS-OPS-Pers	: Serikat Penerbit Surat Kabar, Organisasi Perusahaan Sejenis, Pers
TAP MPRS	: Ketetapan MPRS
TNI-AD	: Tentara Nasional Indonesia-Angkatan Darat
TVRI	: Televisi Republik Indonesia
UU	: Undang-Undang
UUD	: Undang-Undang Dasar

## DAFTAR ISTILAH

afiliasi	: masuk menjadi anggota, berbaur atau pertalian sebagai anggota atau cabang.
anonimitas	: produksi dan distribusi pesanan dilakukan tanpa menyebut nama individu.
<i>Bataviasch Nouvellas</i>	: pers pertama pada zaman Belanda, terbit pertama kali tahun 1744.
distribusi	: penyaluran barang dari tempat produksi ke konsumsi.
gandulan	: bergantungnya sesuatu pada suatu benda.
harga C&F	: harga beli barang yang dilakukan dari luar negeri, harga tersebut di dalamnya sudah termasuk harga ongkos kirim barang hingga sampai ke tempat tujuan.
indoktrinisasi	: pemberian ajaran secara mendalam suatu doktrin atau paham tertentu.
<i>Li po</i>	: surat kabar Cina pertama di Indonesia, terbit pertama kali tahun 1901.
medan priyayi	: pelopor lahirnya pers di Indonesia, terbit pertama kali tahun 1907.
nefos	: New Emerging Forces, kelompok negara-negara terjajah dan bekas jajahan yang berusaha melepaskan diri dari pengaruh negara penjajah.
pers bebas	: Sebutan untuk pers pada masa Demokrasi Liberal
pers mandiri	: Surat kabar yang berdiri sendiri sebagai lembaga, dan tidak terkait dengan partai politik atau organisasi massa mana pun.
pers terpimpin	: sebutan untuk pers pada masa Demokrasi Terpimpin.
<i>Personal Journalism</i>	: Sebuah jurnalisme yang secara signifikan tampil di khalayak dengan suara dan sikap yang seirama dengan

	pikiran, pandangan, dan idealisme pemimpin redaksinya.
<i>retooling</i>	: memperlengkapi kembali.
sirkulasi	: jumlah barang cetakan surat kabar atau majalah yang dicetak oleh surat kabar atau majalah tersebut.
<i>staat van oorlog en beleg</i>	: Indonesia dinyatakan dalam keadaan darurat perang.
subsidi	: pemberian bantuan dari pemerintah.
sukarnoisme	: ajaran Sukarno yang dianggap baik oleh para pendukungnya.
ton	: satuan ukuran berat 1.000 kg.
<i>trending Topic</i>	: topik yang sedang sering diberitakan oleh surat kabar.
<i>UNTEA</i>	: <i>United Nations Temporary Executive Authority</i> , badan pelaksana sementara PBB yang berdiri di bawah kekuasaan Sekretaris Jenderal PBB
USDEK	: intisari dari Manifesto Politik, yaitu satu perkataan yang mengandung singkatan-singkatan yaitu Undang-Undang Dasar 1945, Sosialis Indonesia, Demokrasi Terpimpin, Ekonomi Terpimpin, dan Kepribadian Indonesia

## DAFTAR GAMBAR

1. Ajaran-Ajaran Pemimpin Besar Revolusi dengan judul “Mencapai Indonesia Merdeka” yang ditulis oleh Harian Rakyat pada tanggal 2 Maret 1965, hlm. II. 121
2. Ajaran-Ajaran Pemimpin Besar Revolusi dengan judul Indonesia Versus Fasisme: Faham Yang Bertentangan dengan Jiwa Indonesia yang ditulis oleh Harian Rakyat pada tanggal 2 Agustus 1965, hlm. II. 122

## DAFTAR TABEL

2.1	Sirkulasi Surat Kabar Tahun 1949-1961	40
2.2	Sirkulasi Surat Kabar Indonesia Tahun 1955 Sampai Dengan 1964	42
3.3	Dewan Pembantu Pembinaan Pers	74
3.4	Dewan Pertimbangan Pers	76
4.5	Tindakan dan Tuduhan Pemerintah terhadap Pers Tahun 1958	97
4.6	Tindakan dan Tuduhan Pemerintah terhadap Pers Pada Tahun 1959	100
4.7	Tindakan dan Tuduhan Pemerintah terhadap Pers Tahun 1960	101
4.8	Ikhtisar Tindakan dan tuduhan Pemerintah Terhadap Pers yang Menentang Pemerintah 1952-1965	104
4.9	Data Surat Kabar Di Jakarta Pada Tahun 1964	109



## DAFTAR LAMPIRAN

A. Formulir Pendaftaran Izin Penerbitan Surat Kabar dan Majalah	129
B. Harian Rakyat, 21 Desember 1964 yang memuat tentang Pengumuman Presiden/Panglima Tertinggi ABRI/KOTI No. D/450/KOTI/64	131
C. Lampiran B. Roeslan Abdulgani, Kemerdekaan dalam Alam Demokrasi Terpimpin	133
D. Pidato Presiden Sukarno pada Rapat Umum “Maju Tak Gentar” Memperingati Ulang Tahun Ke-19 Persatuan Wartawan Indonesia di Istora Bung Karno, Senayan, Jakarta	136
E. Surat Keputusan Menteri Penerangan Republik Indonesia No. 24/SK/M/63 tentang Dewan Pembantu Menteri Penerangan dalam Pembinaan Pers dan Surat Keputusan Menteri Penerangan Republik Indonesia No. 25/SK/M/63 tentang Dewan Pertimbangan Pers	143
F. Pemberitaan yang Menyebabkan Surat Kabar Mengalami Pemberedelan	149
G. Sambutan J.M. Wampa Khusus/Menpen Dr. H. Roeslan Abdulgani pada Upacara Pembukaan Kongres PWI Ke-XI di Jakarta	155
H. Tabel Tindakan dan Tuduhan terhadap Pers Tahun 1959-1965	171
I. Daftar Oplah dan Pemakaian Kertas Koran	178

## ABSTRAK

Skripsi berjudul “Sistem Pengawasan Pers di Indonesia Pada Masa Demokrasi Terpimpin 1959-19655” ini disusun menggunakan metode sejarah kritis yang meliputi empat tahap yakni: 1) heuristik, yakni dengan mencari dan mengumpulkan sumber-sumber sejarah baik itu primer maupun sekunder; 2) kritik sumber, untuk mendapatkan otentisitas serta kredibilitas dari sumber terkait; 3) interpretasi, menafsirkan dan menggabungkan fakta yang satu dengan fakta lainnya; 4) historiografi, proses penulisan kembali peristiwa sejarah. Permasalahan Skripsi ini ialah pers yang seharusnya mendapatkan hak kebebasan dan kontrol sosial, namun pada masa Demokrasi Terpimpin, pers justru mendapatkan hal sebaliknya, pers dituntut harus mengikuti politik pemerintah. Skripsi yang menggunakan pendekatan sosial-politik ini membahas tentang pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah kepada pers pada masa Demokrasi Terpimpin. Pengawasan tersebut dilakukan agar pers tidak mengganggu ketertiban umum dan mengganggu jalannya revolusi. Pers juga digunakan sebagai alat revolusi dan menyebarkan Manifesto Politik oleh pemerintah yang berkuasa.

Pada masa Demokrasi Terpimpin, terdapat tiga jenis pers yaitu Pers Independen, Pers Partai, dan Pers Afiliasi. Pada masa Demokrasi Terpimpin juga terdapat Pers Cina dan Pers Inggris yang merupakan surat kabar yang menggunakan bahasa Cina dan Bahasa Inggris. Pada masa Demokrasi Terpimpin, pers memiliki karakter sebagai pers yang memiliki jiwa Sosialis Indonesia, yang mendukung Revolusi Indonesia serta memopulerkan Manifesto Politik yang telah menjadi Garis Besar Haluan Negara.

Pers pada masa Demokrasi Terpimpin mendapatkan pengawasan oleh pemerintah. Pengawasan dilakukan dengan menggunakan Surat Izin Terbit dan isi pemberitaan yang dimuat dalam surat kabar. Surat izin terbit digunakan agar pers bersedia dijadikan sebagai alat revolusi dan mendukung Manifesto Politik. Pengawasan terhadap isi pemberitaan pers dilakukan agar pers tetap menjaga keamanan dan tidak mengganggu berjalannya revolusi. Namun, pada masa Demokrasi Terpimpin pers yang mengikuti kemauan pemerintah dan tidak melawan diberikan bantuan oleh pemerintah untuk kemajuan pers dengan memberikan fasilitas pers dan subsidi pembelian kertas koran. Pada masa Demokrasi Terpimpin Pers yang melawan dan melakukan pemberitaan yang dirasa pemerintah dapat mengganggu ketertiban umum dan Revolusi akan mendapatkan pelarangan terbit atau pencabutan surat izin terbit dan tidak mendapat hak fasilitas yang diberikan oleh pemerintah. Pengawasan yang dilakukan pemerintah memiliki dampak seperti ketidakstabilan jumlah surat kabar, pembredelan yang dilakukan kepada surat kabar, dan susahnya surat kabar untuk berkembang akibat sering dilakukan pemberedelan.

## **ABSTRACT**

*The title of this thesis is “The Press Surveillance’s System in Guided Democracy 1959-1965” that arrange by Historical-Critical Method which including four steps, these are: 1) heuristic, that is to find and collect historical source either primary or secondary; 2) source criticism, to get the authenticity and credibility from relevant source; 3) interpretation, to interpret and combine between one fact with another; 4) historiographical, the process of rewrite a history events. The problems of this thesis are the press that should get independency and control social, but in the period of Guided Democracy, the press got the opposite thing instead, the press is required to follow government policy. This thesis that use social-politic approach discuss about surveillance whose did by government to the press in Guided Democracy. The surveillance conducted so that the press did not disturb public order and revolution. Press used as revolution instrument and spread political manifesto by the government in power.*

*In the time of Guided Democracy, there were three types of the press. They were The Independence Press, The Party Press, and The Affiliation Press. In Guided Democracy, there were China Press and England Press which represented newspaper with Chinese and English. In Guided Democracy, the press had character as Indonesian Socialist Press who supported revolution and popularized Political Manifesto who became outline of The Country’s Great Outline.*

*In Guided Democracy, Press got surveillance by the government. The surveillance conducted by use publishing license and the news contents that published in newspaper. Publishing license conducted so that Press be willing used as revolution instrument and support political manifesto. The surveillance of the contents of the press conducted so that the press steadfastly to maintain safety and did not disturb revolution. But, in Guided Democracy, the press who followed and did not against government will be given an accommodation for the press’ advance by give some facilities and newsprint’s subsidy. In Guided Democracy, the press who against and did reporting that the government thought will disturb public order and revolution will get neither prohibition of publishing nor the repeal of publishing license. Furthermore, the press had been not getting the facilities authorization by the government. The surveillance by government had some impacts. Those were the instability of the amount of newspaper, repeal of the newspaper, and the difficulty to develop as an effect of repeal.*

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang dan Permasalahan

Pers adalah sebuah medium bagi sistem politik. Pers berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan antara kepentingan pemerintah dan masyarakat. Pengawasan terhadap pers telah dilaksanakan sejak Indonesia masih dalam status jajahan Belanda, karena pers atau media cetak merupakan sarana yang ampuh untuk melancarkan penghinaan, kecaman dan sebagai alat penghasut agar orang melakukan kejahatan atau pemberontakan terhadap pemerintah dan negara.<sup>1</sup> Pemerintah selalu mengatur pers melalui peraturan atau undang-undang pers. Hubungan antara pers dan pemerintah dapat dilihat secara normatif mengenai sistem pers suatu negara yang merupakan bagian integral dari ideologi dan sistem politik yang berlaku.<sup>2</sup> Setelah Indonesia merdeka, peraturan perundang-undangan yang dijadikan landasan untuk melaksanakan pengawasan terhadap pers dan barang cetakan mengalami beberapa kali perubahan.<sup>3</sup>

Pada 5 juli 1959, Presiden Sukarno mengumumkan Dekrit Presiden yang diharapkan dapat membuka jalan tercapainya suatu ketenangan dalam kehidupan politik. Dekrit Presiden tersebut membawa semangat baru dalam perjuangan bangsa untuk mencapai cita-cita nasional Indonesia.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup>A. Hamzah dkk, *Delik-Delik Pers di Indonesia* (Jakarta: Media Sarana Press, 1987), hlm. 34.

<sup>2</sup>Anwar Arifin, *Pers dan Dinamika Politik: Analisis Media Komunikasi Politik Indonesia* (Jakarta: Yursif Watampone, 2010), hlm. 67-68.

<sup>3</sup>Hamzah, *Delik-Delik Pers*, hlm. 42.

<sup>4</sup>I. Taufik, *Sejarah dan Perkembangan Pers di Indonesia* (Jakarta: PT Triyinco, 1977), hlm. 69.

Dekret Presiden 5 Juli 1959 tersebut mengakhiri sistem Pers Bebas yang dianut sejak awal revolusi. Pada saat sistem Pers Bebas, umumnya surat kabar dimiliki oleh swasta termasuk partai politik atau golongan sosial, dan bebas dari tekanan pemerintah. Pers memiliki kebebasan yang luas untuk mengetahui, memberitakan, menyetujui atau tidak menyetujui dan mendiskusikan segala sesuatu, termasuk hal yang menyangkut kehidupan politik dan pemerintahan.<sup>5</sup>

Pers Bebas banyak mengalami hambatan, walaupun pemerintah secara resmi memberikan kebebasan kepada pers, sehingga pers memiliki fungsi ikut mengawasi jalannya kekuasaan. Namun, tekanan terhadap pers tetap terjadi terutama pada masa SOB (*Staat van Oorlog en Beleg*), yaitu ketika Indonesia dinyatakan dalam keadaan darurat perang. Pada saat dalam keadaan darurat perang ini, Pemerintah memberikan wewenang kepada militer untuk mengawasi kehidupan politik dan mengontrol pers demi ketertiban dan keamanan. Selanjutnya, pada tanggal 1 Oktober 1957 Penguasa Perang Daerah Jakarta Raya mewajibkan semua penerbitan pers dalam wilayah Jakarta Raya memiliki izin terbit. Pada tanggal 12 Oktober 1960 Penguasa Perang Tertinggi mewajibkan pula izin terbit bagi pers di seluruh Indonesia.<sup>6</sup>

Setelah diberlakukannya Demokrasi Terpimpin yang ideologinya diuraikan Sukarno dalam pidato pada 17 Agustus 1959 yang kemudian dikenal dengan nama Manipol (Manifesto Politik), Sukarno menyuarakan kembali semangat revolusi, keadilan sosial, dan pelengkapan kembali lembaga-lembaga dan organisasi-organisasi negara demi revolusi yang berkesinambungan.<sup>7</sup> Kedudukan dan fungsi pers Indonesia pun kemudian diarahkan kepada jalan tujuan dan politik tersebut.

Sesudah Dekrit Presiden 5 Juli 1959, berturut-turut penguasa mengeluarkan peraturan-peraturan yang bertujuan untuk lebih mengetatkan pengawasan terhadap

---

<sup>5</sup>Arifin, *Pers dan Dinamika Politik*, hlm. 69-71.

<sup>6</sup>Arifin, *Pers dan Dinamika Politik*, hlm. 70-71.

<sup>7</sup>Marle Calvin Ricklefs, *Sejarah Indonesia Modern 1200-2004* (Jakarta: Serambi, 2001) hlm. 527.

pers.<sup>8</sup> Terbentuknya Kabinet Kerja di bawah pimpinan Presiden Sukarno, maka terjaminlah untuk sementara waktu suatu pemerintahan yang stabil.<sup>9,10</sup>

Sistem dan fungsi pers Indonesia pada masa Demokrasi Terpimpin menganut konsep otoriter, yakni sebagai terompet penguasa dan bertugas antara lain mengagungkan pribadi Sukarno sebagai Pemimpin Besar Revolusi, dan mengindoktrinasi Manipol. Tekanan terhadap pers pada masa ini adalah pada aksi-aksi masa, sehingga menjadikan pers sebagai alat pendidikan massa untuk menegakkan Demokrasi Terpimpin.<sup>11</sup>

Penguasa Perang Jakarta Raya pada 1 Agustus 1959 mencabut larangan kegiatan politik yang dikenakan selama krisis sesudah Presiden menyatakan kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. Namun, Penguasa Perang melakukan pengawasan ketat terhadap pers. Bermulainya tekanan terhadap kebebasan pers, maka berakhirilah kebebasan dan menyatakan pendapat di Indonesia. Kurang dari sebulan sesudah pengumuman tersebut, Departemen Penerangan mengeluarkan pemberitahuan seharusnya disambut gembira oleh para penerbit, Kementerian Penerangan mengumumkan kesediaannya membantu surat-surat kabar dengan menyediakan kredit untuk keperluan pembayaran gaji dan pembelian kertas koran.<sup>12</sup>

Pada April 1960 Penguasa Perang mulai melakukan sanksi-sanksi perizinan terhadap pers, demi kepentingan pemeliharaan ketertiban umum dan ketenangan.<sup>13</sup> Bentuk kontrol ini digunakan lebih luas pada tahun berikutnya, pers harus bersedia

---

<sup>8</sup>Serikat Penerbit Surat kabar, *Garis Besar Perkembangan Pers Indonesia* (Jakarta: Serikat Penerbit Surat kabar, 1971), hlm. 128.

<sup>9</sup>Taufik, *Sejarah dan Perkembangan Pers*, hlm. 69.

<sup>10</sup>Arifin, *Pers dan Dinamika Politik*, hlm. 200.

<sup>11</sup>Taufik, *Sejarah dan Perkembangan Pers*, hlm. 72.

<sup>12</sup>Edward Cecil Smith, *Pemberedelan Pers di Indonesia* (Jakarta: Pustaka Grafitipers, 1986), hlm. 187.

<sup>13</sup>Smith, *Pemberedelan Pers di Indonesia*, hlm. 186-191.

menjadi alat revolusi, mendukung Demokrasi Terpimpin dan harus berjiwa Nasakom (Nasionalis, Sosialis, Komunis). Karena pers harus menjadi alat revolusi dan mendukung Demokrasi Terpimpin, pemerintah memberikan bantuan kepada pers, bantuan tersebut berupa pembinaan pers yang dilakukan oleh Departemen Penerangan Republik Indonesia.<sup>14</sup> Sukarno terus mendesak pers agar secara giat mempopulerkan politiknya.<sup>15</sup> Pada Oktober 1960, pemerintah melarang semua kritik, kecuali yang konstruktif, mengenai politik Sukarno, dan memerintah para penerbit surat kabar serta majalah menjadi alat untuk menyebarkan Manifesto Politik.

Agar benar-benar menjadi alat revolusi, pada 12 Oktober 1960 Penguasa Perang Tertinggi mengeluarkan peraturan tentang izin terbit terhadap penerbitan surat kabar dan majalah.<sup>16</sup> Pada akhir tahun 1960 penerbit harus menandatangani pernyataan yang terdiri atas 19 butir untuk mendukung program tersebut, jika tidak dilakukan harus berhenti terbit. Namun, pada tahun 1958 Penguasa Perang Tertinggi hanya menyatakan bahwa izin semacam itu perlu agar bisa dicegah publikasi yang sensasional dan yang dinilai bertentangan dengan moralitas.<sup>17</sup>

Pada Januari 1961 Menteri Penerangan Maladi mengumumkan penerbitan surat kabar harus bersifat kolektif. Pada bulan yang sama, Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Agung Roeslan Abdulgani menyatakan bahwa untuk menjadi seorang wartawan pertama-tama harus menjadi seorang sosialis. Pada 1 Maret 1961 Harian *Indonesian Observer* memuat pengumuman bahwa Penguasa Perang Tertinggi (Presiden Sukarno) mengeluarkan peraturan yang menempatkan semua percetakan, yang seluruhnya atau sebagian dimiliki perorangan swasta, di bawah pengawasan pemerintah. Pada tahun

---

<sup>14</sup>Arifin, *Pers dan Dinamika Politik*, hlm. 201.

<sup>15</sup>Smith, *Pemberedelan Pers di Indonesia*, hlm. 197-199.

<sup>16</sup>Arifin, *Pers dan Dinamika Politik*, hlm. 73.

<sup>17</sup>Abdurachman Surjomihardjo, *Beberapa Segi Perkembangan Sejarah Pers di Indonesia* (Jakarta: Kompas, 2002), hlm. 181.

1962 pemerintahan mengobarkan semangat merebut Irian Barat dari tangan Belanda, untuk mendukung kampanye itu, Menteri Penerangan yang baru, Muhammad Yamin, mendesak pers agar menjalankan peranan penting dalam melancarkan roda revolusi.<sup>18</sup> Setelah Peperti No. 10 tahun 1960, di dalam pasal 6 Penpres NO.6/1963 juga menegaskan perlunya izin terbit bagi harian dan majalah. Percetakan yang tidak diperbolehkan mencetak harian dan majalah adalah percetakan yang tidak mendapat izin terbit.<sup>19</sup>

Sistem Demokrasi Terpimpin yang berpola otoriter itu ternyata juga tidak mampu menghilangkan konflik politik, malah sebaliknya makin parah. Keruntuhan Demokrasi Terpimpin terjadi ketika Partai Komunis Indonesia (PKI) mengalami kegagalan dalam pemberontakannya pada 30 September 1965.<sup>20</sup> Peristiwa Gestapu yang disokong oleh sebagian dari Pers Indonesia dengan sendirinya membawa perubahan besar dalam perkembangannya. Setelah pemerintah kembali menguasai keadaan, surat kabar dan majalah yang menyokong PKI diberedel hingga tinggal beberapa surat kabar dan majalah yang dapat terbit dan mulailah pers Indonesia melangkah masuk ke masa Orde Baru.<sup>21</sup>

Dari latar belakang di atas dapat diketahui bahwa pada masa Demokrasi Terpimpin pers Indonesia mengalami banyak tekanan dan pengawasan dari pemerintah. Surat kabar harus memiliki surat izin terbit dan banyak surat kabar pada masa Demokrasi Terpimpin yang harus ditutup akibat dibredel atau alasan lain. Oleh karena itu, penelitian terhadap sistem pengawasan pers di Indonesia pada masa Demokrasi Terpimpin tahun 1959-1965 adalah penting untuk dilakukan. Dalam skripsi ini, permasalahan yang diangkat adalah: pers yang seharusnya mendapatkan hak

---

<sup>18</sup>Smith, *Pemberedelan Pers di Indonesia*, hlm. 200-201.

<sup>19</sup>Surjomihardjo, *Beberapa Segi Perkembangan*, hlm. 183

<sup>20</sup>Arifin, *Pers dan Dinamika Politik*, hlm. 74.

<sup>21</sup>Taufik, *Sejarah dan Perkembangan Pers*, hlm. 75-76



kebebasan dan kontrol sosial, namun pada masa Demokrasi Terpimpin, justru terjadi hal sebaliknya, pers dituntut harus mengikuti politik pemerintah.

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka dalam penelitian ini diajukan beberapa pertanyaan penelitian, yaitu sebagai berikut. *Pertama*, bagaimana keadaan Pers di Indonesia pada masa Demokrasi Terpimpin dan apa saja *trending topic* pemberitaan pada masa Demokrasi Terpimpin. *Kedua*, bagaimana sistem pengawasan atau kontrol pemerintah terhadap Pers di Indonesia yang dilakukan pada masa Demokrasi Terpimpin. *Ketiga*, Bagaimana dampak dari pemberlakuan pengawasan pada masa tersebut.

## **B. Ruang Lingkup**

Penelitian sejarah membutuhkan adanya ruang lingkup untuk membatasi luasnya pembahasan dan analisis, agar analisis ini terarah sesuai dengan rumusan masalah yang telah ditetapkan. Penulisan Skripsi ini menerapkan beberapa pembatasan, yaitu batasan temporal, batasan spasial, dan batasan keilmuan. Lebih lengkapnya, ketiga batasan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut.

Ruang lingkup temporal skripsi ini adalah antara tahun 1959 sampai dengan tahun 1965. Tahun 1959 dipilih sebagai batas awal kajian dengan alasan bahwa pada tahun itu awal dimulainya Demokrasi Terpimpin. Sistem Pers Terpimpin dimulai setelah sistem Pers Bebas secara resmi dinyatakan berakhir ketika Presiden Sukarno mengeluarkan Dekrit 5 Juli 1959 sebagai usaha mengatasi krisis politik yang terjadi pada masa itu.<sup>22</sup> Pemberlakuan Dekrit presiden tersebut menyebabkan bermulainya masa Demokrasi Terpimpin. Tahun 1965 dipilih sebagai batas akhir karena tahun ini merupakan runtuhnya Demokrasi Terpimpin. Sistem Pers Terpimpin berakhir ketika PKI mengalami kegagalan dalam melakukan pemberontakan pada 30 September-1 Oktober 1965. Keruntuhan Demokrasi Terpimpin sejalan dengan runtuhnya kekuasaan

---

<sup>22</sup>Arifin, *Pers dan Dinamika Politik*, hlm. 72.

Sukarno meskipun sistem politik ini secara resmi dianggap berakhir pada 11 Maret 1966.<sup>23</sup> Sesudah terjadi pemberontakan yang dilakukan oleh PKI pada 30 September-1 Oktober 1965, pada 2 Oktober 1965 melalui siaran radio, Presiden Sukarno mengumumkan bahwa ia telah mengangkat Mayor Jenderal Soeharto sebagai pemimpin angkatan darat sementara waktu. Dengan pecahnya peristiwa G-30-S 1965, kontrol pers sepenuhnya berada di tangan TNI-AD.<sup>24</sup>

Lingkup spasial dalam skripsi ini adalah nasional. Hal ini didasarkan pada alasan bahwa skripsi ini membahas mengenai sistem pengawasan pers. Semua pers yang ada di Indonesia terkena kebijakan yang dikeluarkan pemerintah. Pada kenyataannya pers yang diawasi tidak hanya pers nasional, tetapi juga pers daerah.

Sementara itu, lingkup keilmuan skripsi ini adalah sejarah politik. Menurut David Easton: "Ilmu politik adalah studi mengenai terbentuknya kebijakan Umum".<sup>25</sup> Kajian sejarah politik dalam skripsi ini difokuskan pada pembahasan tentang sistem pengawasan pers pada masa Demokrasi Terpimpin dan dampaknya terhadap kehidupan pers di Indonesia.

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pada latar belakang permasalahan dan batasan ruang lingkup di atas, dalam penelitian ini dikembangkan beberapa tujuan penelitian untuk memperjelas fokus analisis sebagai berikut.

Pertama, menjelaskan kondisi pers di Indonesia pada masa Demokrasi Terpimpin dan menjelaskan jenis-jenis surat kabar dan *trending topic* pemberitaan yang dilakukan oleh surat kabar atau majalah. Kedua, menjelaskan sistem pengawasan atau kontrol dan

---

<sup>23</sup>Arifin, *Pers dan Dinamika Politik*, hlm. 74.

<sup>24</sup>Taufik Abdullah dan A.B. Lopian (ed), *Indonesia dalam Arus Sejarah: Pasca Revolusi* (Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, 2012), hlm. 131

<sup>25</sup>Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2007), hlm. 13.

bentuk pengawasan pemerintah terhadap pers di Indonesia pada masa Demokrasi Terpimpin tahun 1959-1965, termasuk kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah sebagai landasan pengawasan terhadap pers. Ketiga, menganalisis dampak-dampak yang disebabkan oleh pengawasan terhadap surat kabar dan majalah pada masa Demokrasi Terpimpin dan menjelaskan pemberedelan-permberedelan yang terjadi pada Pers di Indonesia pada masa Demokrasi Terpimpin.

#### **D. Tinjauan Pustaka**

Penelitian tentang sistem pengawasan pers di Indonesia pada masa Demokrasi Terpimpin menggunakan enam buku sebagai tinjauan pustaka. Buku *pertama*, adalah karya Edward C. Smith, yang berjudul *Pemberedelan Pers Indonesia*.<sup>26</sup> Secara garis besar buku ini membahas tentang tekanan terhadap pers di Indonesia pada tahun 1949-1965. Dalam buku ini Smith juga membahas keadaan Indonesia pada masa kolonial Belanda hingga masa pecahnya peristiwa G 30 S, seperti keadaan penduduk, perekonomian, pendidikan, kebudayaan, adat istiadat, dan sebagainya. Pada masa Demokrasi Terpimpin, Indonesia kembali ke UUD 1945 yang berarti kita kembali kepada presiden sebagai tokoh kekuasaan dan pembubaran parlemen pada Maret 1960 serta mengangkat anggota parlemen yang baru. Pada buku ini juga dibahas mengenai perjuangan pers Indonesia untuk terbit dan mendirikan suatu lembaga pers pada masa penjajahan Belanda hingga masa berjuang melawan sistem pers yang diterapkan setelah Indonesia merdeka. Selanjutnya, buku ini juga membahas mengenai Pers Belanda, Pers Cina, dan Pers Indonesia. Buku ini juga berisi pembahasan mengenai kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pemerintah sebagai landasan pengawasan terhadap pers. Buku ini juga menjelaskan pemberedelan-pemberedelan pers di Indonesia.

---

<sup>26</sup>Edward C. Smith, *Pemberedelan Pers di Indonesia* (Jakarta: Pustaka Grafitipers, 1986).

Relevansi buku ini dengan penelitian yang dibuat oleh penulis adalah informasi mengenai kebijakan-kebijakan pemerintah yang dapat digunakan sebagai sumber sekunder tentang kontrol pemerintah terhadap pers. Penjelasan tentang pemberedelan pers dan surat kabar-surat kabar yang diberedel pada masa ini dapat digunakan sebagai gambaran keadaan pers pada masa Demokrasi Terpimpin.

Perbedaan antara buku ini dan skripsi ini adalah dalam skripsi ini dibahas mengenai peraturan-peraturan yang dikeluarkan pemerintah untuk mengawasi pers dan menjadikan pers sebagai alat revolusi. Dalam Skripsi ini juga dibahas mengenai dampak yang ditimbulkan dari pengawasan yang dilakukan pemerintah. Skripsi ini juga membahas tentang pemberedelan pers dengan menampilkan pemberitaan-pemberitaan yang membuat surat kabar tersebut mengalami pemberedelan. Berbeda dengan buku ini pembahasannya tentang pembredelan yang dialami oleh pers dan menampilkan tabel tindakan yang dilakukan terhadap pers pada setiap tahunnya dari 1959 hingga 1965.

Buku *kedua*, adalah *Indonesian Government and Press During Guided Democracy*, yang ditulis oleh Oey Hong Lee.<sup>27</sup> Secara garis besar dalam buku ini dibahas keadaan pemerintahan dan pers pada masa Demokrasi Terpimpin. Pada bab awal buku ini membahas keadaan pemerintahan dan pers pada masa sebelum Demokrasi Terpimpin, dari masa Kolonial Belanda hingga masa Demokrasi Terpimpin. Buku ini juga memuat pembahasan mengenai terbentuknya Pers Terpimpin dan keadaan pers pada masa Demokrasi Terpimpin yang membahas mengenai isi pembahasan pers pada masa Demokrasi Terpimpin, kebebasan pers, permasalahan produksi dan distribusi pers, dan panjang umur surat kabar yang ada di Indonesia. Selanjutnya, juga dijelaskan mengenai beberapa Undang-Undang tentang pers yang dikeluarkan pada masa Demokrasi Terpimpin, seperti TAP MPRS No. II/MPRS/1960 tentang Garis-Garis Besar Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana Tahap

---

<sup>27</sup>Oey Hong Lee, *Indonesian Government and Press During Guided Democracy* (Zug Switzerland: Inter Documentation, 1971).

Pertama 1961-1969 dan Peperti No. 3/1960 tentang Pembatasan Terhadap Percetakan, Penerbitan, Pengumuman, Penyampaian, Penyebaran, Perdagangan dan Penempelan Surat Kabar Atau Majalah Yang Menggunakan Huruf Bukan Huruf Lain atau Huruf Arab atau Huruf Daerah Indonesia. Pada bab lainnya dibahas mengenai prestasi dari Demokrasi Terpimpin, seperti perjuangan anti-Imperialis, Indonesia melakukan nasionalisasi kepada perusahaan-perusahaan milik Belanda dan melakukan perjuangan untuk mempertahankan Irian Barat. Perjuangan anti-feodal yaitu dengan menerapkan dua hukum agraria, diajukan untuk menghilangkan perbudakan di daerah pedesaan. Pemulihan keamanan nasional, kebijakan pemerintah di bidang ekonomi. Selain prestasi Demokrasi Terpimpin juga dibahas keadaan jurnalis pada masa Demokrasi Terpimpin dan berdirinya perusahaan pers baru nasional Antara.

Relevansi buku ini dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah buku ini menjelaskan beberapa peraturan yang dikeluarkan pada masa Demokrasi Terpimpin yang dapat digunakan sebagai sumber sekunder dari penelitian, namun buku ini tidak menjelaskan bagaimana penerapan peraturan tentang pers tersebut. Selain menjelaskan peraturan-peraturan buku ini menjelaskan proses terbentuknya Pers Terpimpin dan keadaan pers pada masa Demokrasi Terpimpin yang dapat digunakan sebagai gambaran keadaan Demokrasi Terpimpin.

Perbedaan buku ini dengan skripsi ini adalah di dalam skripsi ini dibahas mengenai pemberian subsidi dan fasilitas kepada pers. Skripsi ini juga membahas mengenai pemberian izin terbit kembali kepada pers yang mengalami pembredelan. Dalam skripsi ini juga membahas mengenai pemberedelan Pers Cina yang ada di Indonesia. Selain pemberedelan Pers Cina, skripsi ini juga membahas mengenai pemberian izin pembelian kertas koran untuk surat kabar dan tentang kebijakan pemerintah mengenai pers harus memuat ajaran-ajaran Bung Karno.

Buku *ketiga*, adalah karya dari I Taufik, yang berjudul *Sejarah dan Perkembangan Pers di Indonesia*.<sup>28</sup> Buku ini membahas secara luas sejarah pers di Indonesia. Di dalam buku ini dibahas perkembangan pers di Indonesia dari masa awal terbentuknya pers di Indonesia hingga masa pemerintahan Orde Baru. Pada setiap zaman, campur tangan pemerintah terhadap pers diwujudkan dengan peraturan-peraturannya. Dalam buku ini pers di Indonesia dibagi dalam tiga bagian yaitu Pers Kolonial, Pers Cina, dan Pers Nasional, dan Pers Nasional dibagi juga menjadi tiga masa yaitu masa Demokrasi Liberal, Demokrasi Terpimpin dan Orde Baru. Buku ini memperlihatkan perbedaan keadaan pers pada setiap masanya.

Relevansi buku ini dengan penelitian adalah penjelasan tentang perkembangan pers di Indonesia dari masa ke masa, hal ini dapat digunakan untuk menggambarkan keadaan pers di Indonesia. Selanjutnya, buku ini juga menjelaskan beberapa peraturan yang diterapkan sebagai landasan dari pemerintah untuk melakukan kontrol terhadap pers yang dapat digunakan sebagai sumber penelitian.

Perbedaan buku ini dengan skripsi ini adalah skripsi ini membahas mengenai landasan pengawasan terhadap pers dan membahas mengenai pembredelan terhadap pers. Skripsi ini juga membahas mengenai pemberian izin kembali kepada surat kabar dan majalah yang mengalami pemberedelan dan pemberian surat izin pembelian kertas koran terhadap surat kabar dan majalah. Dalam buku ini hanya membahas perkembangan pers dari masa pendudukan Belanda sampai pada masa Orde Baru secara singkat.

Buku *keempat*, adalah buku yang berjudul *Pers dan Dinamika Politik: Analisis Media Komunikasi Politik Indonesia*, yang ditulis oleh Anwar Arifin.<sup>29</sup> Buku ini secara garis besar membahas mengenai hubungan pemerintah dengan pers. Pers merupakan

---

<sup>28</sup>I. Taufik, *Sejarah dan Perkembangan Pers di Indonesia* (Jakarta: PT Triyinc, 1977).

<sup>29</sup>Anwar Arifin, *Pers dan Dinamika Politik: Analisis Media Komunikasi Politik Indonesia* (Jakarta: Yursif Watampone, 2010).

lembaga yang ikut dalam pemerintahan di luar trias politika dan pers juga memiliki fungsi kontrol sosial. Buku ini menjelaskan perkembangan pers di Makassar secara garis besar dan juga menjelaskan sistem pengawasan terhadap pers dan keadaan pers yang terjadi di Makassar dan di Sulawesi pada masa setelah Indonesia merdeka. Pada buku ini banyak membahas mengenai pers *Pedoman Rakyat* dan membahas keadaan politik di Sulawesi khususnya Makassar dan harian *Pedoman Rakyat* di setiap masanya, dari awal terbentuk, memasuki Demokrasi Terpimpin dan Orde Baru, dan juga keadaan pers independen dan pers pemerintah di setiap masa pemerintahan tersebut.

Relevansi buku ini dengan topik yang dibuat oleh penulis adalah dalam buku ini menjelaskan sistem pengawasan pers dan keadaan pers masa Demokrasi Terpimpin di Sulawesi dan Makassar. Hal tersebut dapat digunakan sebagai pandangan terhadap pengawasan pers yang terjadi di Indonesia pada masa Demokrasi Terpimpin.

Perbedaan buku ini dengan skripsi ini adalah terletak pada ruang lingkup spasial. Buku ini membahas mengenai pers di Makassar dan membahas mengenai surat kabar *Pedoman Rakyat*. Dalam buku ini surat kabar *Pedoman Rakyat* dan *Merhaen* dari pertama kali mereka lahir dan memasuki setiap masa, dari masa revolusi dimulai dengan lahirnya *Pedoman Rakyat*, setelah itu memasuki masa Demokrasi Parlementer, Demokrasi Terpimpin, dan Orde Baru. Sementara skripsi ini membahas mengenai pengawasan pers yang terjadi pada ruang lingkup nasional, yaitu pengawasan terhadap pers yang terjadi di Indonesia.

Buku *Kelima*, adalah buku berjudul *Delik-Delik Pers di Indonesia*, yang merupakan karya dari A. Hamzah dkk.<sup>30</sup> Buku ini secara garis besar membahas mengenai pelanggaran-pelanggaran terhadap peraturan-peraturan tentang pers di Indonesia dan hukuman yang dilakukan terhadap mereka yang melanggar peraturan-peraturan tersebut. Bagian awal buku ini menjelaskan mengenai delik-delik pers dan

---

<sup>30</sup>A. Hamzah dkk, *Delik-Delik Pers di Indonesia* (Jakarta: Media Sarana Press, 1987).

fungsi pers, dari masa awal terbentuk pers di Indonesia dan setelah itu menjelaskan perkembangan pengawasan pers di Indonesia berdasarkan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh penguasa pada setiap zamannya dimulai pada masa pemerintahan kolonial Belanda dengan *Staatsblad* Nomor 74 tahun 1856 tentang Reglemen Atas Barang Cetakan di Indonesia, hingga pengawasan dan kebebasan pers di luar Indonesia seperti India, Cina, dan Uni Soviet. Selanjutnya, buku ini juga membahas mengenai perkembangan pers di Indonesia yang menampilkan kebijakan-kebijakan pemerintah terhadap pengawasan pers.

Relevansi buku ini dengan topik yang dibuat oleh penulis adalah pada buku ini terdapat informasi mengenai peraturan-peraturan dan kebijakan-kebijakan pemerintah terhadap pers yang pada saat itu difungsikan sebagai alat untuk mengontrol pers. Peraturan dan kebijakan tersebut dapat digunakan sebagai pandangan terhadap sistem pengawasan pers pada masa Demokrasi Terpimpin.

Perbedaan buku ini dengan skripsi ini adalah skripsi ini membahas mengenai peraturan-peraturan yang dikeluarkan pemerintah untuk mengawasi pers yang dikeluarkan pada masa Demokrasi Terpimpin. Peraturan tersebut dibahas berdasarkan tujuan dari dikeluarkannya peraturan tersebut. Pada buku ini hanya menjelaskan mengenai peraturan-peraturan yang digunakan untuk mengawasi pers dari masa penjajahan Belanda dengan penetapan *Staatsblad* No. 74 Tahun 1856 tentang *Reglement* Atas Barang Cetakan di Indonesia hingga penetapan Undang-Undang No. 11 Tahun 1966 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pers.

Buku *keenam*, adalah buku yang berjudul *Beberapa Segi Perkembangan Sejarah Pers di Indonesia*, yang disusun oleh Tim Peneliti Sejarah Pers di Indonesia yang diketuai oleh Abdurrachman Surjomihardjo.<sup>31</sup> Buku ini membahas mengenai sejarah perkembangan pers di Indonesia dari masa awal terbentuknya pers di zaman Belanda, mulai masuknya pers melayu dan Tionghoa hingga sampai pada perkembangan pers

---

<sup>31</sup>Abdurrachman Surjomihardjo, *Beberapa Segi Perkembangan Sejarah Pers di Indonesia* (Jakarta: Kompas, 2002).



Indonesia pada masa Indonesia merdeka. Selanjutnya, buku ini membahas perkembangan beberapa pers daerah yang berada di Sulawesi Utara dan juga pers yang berada di Kalimantan Selatan, pada pers di Sulawesi Utara dibahas pada masa kolonialisme, terdapat banyak surat kabar yaitu terdiri dari 36 judul surat kabar, dan di Kalimantan Selatan dibahas surat kabar setelah tahun 1945 seperti surat kabar *Suara Kalimantan*, harian *Kalimantan Berjuang*, *Harian Terompet Rakyat* dan lainnya. Buku ini juga membahas perkembangan pelaksanaan kebijakan terhadap pers dari masa ke masa. Terdapat kebijakan-kebijakan pemerintah di setiap masanya untuk melakukan kontrol terhadap pers. Buku ini juga melampirkan berbagai bentuk kebijakan pemerintah terhadap kebebasan pers.

Relevansi buku ini dengan topik yang dibuat oleh penulis adalah dalam buku ini terdapat lampiran informasi mengenai kebijakan-kebijakan pemerintah terhadap pers yang digunakan sebagai sumber untuk membuat sistem kontrol atau pengawasan pers di Indonesia dan melampirkan dokumen-dokumen tentang pembredelan pers yang dapat digunakan penulis sebagai sumber.

Perbedaan antara buku ini dan skripsi ini adalah pada skripsi ini membahas mengenai pemberian subsidi dan fasilitas kepada pers yang menjalankan fungsinya sebagai alat revolusi dan mendukung Manifesto Politik oleh pemerintah pada masa Demokrasi Terpimpin. Pada skripsi ini juga dibahas dampak dari pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap pers yang tidak terdapat di dalam buku tersebut.

#### **E. Kerangka Pemikiran**

Dalam merekonstruksi hasil penelitian ini digunakan kerangka pemikiran. Kerangka pemikiran yang dibangun pertama adalah “Pers”. Hal ini penting untuk melakukan identifikasi terhadap pers yang diteliti. Pada Undang-Undang Nomor 4 tahun 1967 tentang Pembaharuan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1966 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pers, yang dimaksud dengan Pers adalah lembaga kemasyarakatan dan perjuangan nasional yang mempunyai karya sebagai salah satu media komunikasi

massa yang bersifat umum berupa penerbitan yang teratur waktu terbitnya, dilengkapi dengan alat-alat foto, klise, mesin-mesin stensil atau alat-alat teknik lainnya.<sup>32</sup>

Pers dapat dibedakan ke dalam dua pengertian yaitu pers dalam arti yang luas dan pers dalam arti yang sempit. Dalam arti yang luas, pengertian pers mencakup semua barang tercetak yang ditujukan untuk khalayak ramai seperti surat kabar, majalah, brosur, bulletin, buku, selebaran, dan spanduk. Sebaliknya pers dalam arti yang sempit, sama dengan surat kabar, yaitu lembaran-lembaran tercetak yang isinya bersifat umum dan aktual, serta terbit secara teratur (misalnya setiap hari, setiap minggu, atau sekali dua minggu). Dengan kata lain, surat kabar memiliki sifat publisitas (penyebaran kepada khalayak), periodisitas (terbit teratur dan berkala), universal (isinya beraneka ragam), dan aktualitas (isinya baru terjadi atau kejadian baru).<sup>33</sup> Pers dalam arti sempit merupakan manifestasi dari *freedom of the press* dan pers dalam arti luas merupakan *freedom of speech*.<sup>34</sup> Pers merupakan salah satu institusi sosial yang penting dan berfungsi untuk memberikan *news and view* (berita dan opini) kepada masyarakat dan pemerintah. Fungsi Pers tersebut membuat pers sering juga dipandang sebagai kekuatan demokrasi ke empat, di samping lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif.<sup>35</sup> Dalam skripsi ini pengertian pers yang dipakai adalah pers dalam arti yang tersempit, yaitu surat kabar dan majalah. Pers Indonesia semua surat kabar yang diterbitkan di Indonesia oleh warga negara Indonesia dan berbahasa Indonesia. Adapun beberapa pers atau surat kabar yang mengalami permasalahan dan pemberedelan pada masa Demokrasi Terpimpin adalah kantor berita *PIA (Pers Biro Indonesia)*, *Republik*, *Pedoman* pers yang terbesar di Jakarta, *Berita Indonesia*, *Bintang Timur* di Jakarta, *Times of Indonesia*, *Abadi* yang terbit di Jakarta, *Suara*

---

<sup>32</sup>Hamzah, *Delik-Delik Pers*, hlm. 2.

<sup>33</sup>Arifin, *Pers dan Dinamika Politik*, hlm. 33.

<sup>34</sup>Oemar Seno Adji, *Mass Media dan Hukum* (Jakarta: Erlangga, 1977), hlm. 13

<sup>35</sup>Abdullah, *Indonesia dalam Arus Sejarah*, hlm. 131.

*Rakyat* yang diterbitkan di Surabaya, *Pikiran Rakyat* di Bandung, *Indonesia Raya* dan *Harian Pos Indonesia*.

Sistem adalah suatu kesatuan yang tersusun atas bagian-bagian atau komponen-komponen yang saling bergantung serta berhubung satu sama lain. Masing-masing komponen itu juga berdiri dan berfungsi sendiri, namun saling terkait demi tercapainya suatu tujuan yang ditentukan. Sistem dapat pula merupakan himpunan dari hubungan fungsional berbagai komponen yang mengubah masukan menjadi keluaran melalui suatu proses menurut aturan dan saluran yang telah ditentukan.<sup>36</sup> Pengawasan diartikan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi III adalah penilikan atau penjagaan. Sistem pengawasan yang dimaksud dalam skripsi ini adalah suatu pengendalian dan kontrol yang dilakukan oleh pemerintah.

Pada skripsi ini perlu diartikan “Demokrasi Terpimpin”, Demokrasi Terpimpin adalah masa yang dimulai setelah dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Masuknya Indonesia pada masa Demokrasi terpimpin dengan kembali kepada UUD 1945 maka kembali kepada presiden sebagai tokoh kekuasaan, Sukarno sebagai presiden dan juga sebagai perdana menteri.<sup>37</sup> Pada masa ini Sukarno membawa Indonesia ke dalam revolusi dan membangun masyarakat sosialis Indonesia.<sup>38</sup> Tiga tujuan revolusi Indonesia yang kemudian dianggap menjadi sosialisme Indonesia, yaitu pertama, pembentukan Republik Indonesia sebagai negara kesatuan yang demokratis yang meliputi wilayah antara Sabang dan Merauke, kedua, pembentukan masyarakat adil dan makmur, ketiga, pembentukan perusahaan persahabatan dengan negara-negara semua untuk pencapaian sebuah tatanan internasional yang baru berdasarkan damai

---

<sup>36</sup>F. Rachmadi, *Perbandingan Sistem Pers: Analisis Deskriptif Sistem Pers di Berbagai Negara* (Jakarta: Gramedia, 1990), hlm. 8.

<sup>37</sup>Smith, *Pemberedelan Pers di Indonesia*, hlm. 151.

<sup>38</sup>Abdullah, *Indonesia dalam Arus Sejarah*, hlm. 361.

dan bebas dari imperialisme dan kolonialisme.<sup>39</sup> Lahirnya masa Demokrasi Terpimpin menggantikan masa Demokrasi Parlemerter, yaitu masa ketika Indonesia kembali kepada negara kesatuan setelah adanya kespakan antara RIS dan RI pada 19 Mei 1950 dengan ditanda tanganinya Piagam Persetujuan antara RIS dan pemerintah RI.<sup>40</sup> Masa Demokrasi Parlemerter menggunakan UUDS (Undang-Undang Dasar Sementara) sebagai landasan konstitusional bagi berdirinya suatu Negara Kesatuan RI pada 17 Agustus 1950. Dalam UUDS 1950 sistem pemerintahan yang dianut adalah sistem parlemerter yang berdasarkan pemikiran Demokrasi Liberal.<sup>41</sup> Demokrasi Terpimpin yang dimaksud dalam skripsi ini adalah suatu masa demokrasi di Indonesia pada tahun 1959-1965 yang pada masa itu presiden Indonesia adalah Sukarno.

Menurut Hasyim Asyari ada dua teori mengenai kedudukan pers dalam hubungannya dengan kekuasaan yaitu *pertama*; pers sebagai mediasi dan *kedua*; pers sebagai kekuatan politik. Kedudukan pers sebagai mediasi merupakan refleksi dari dinamika interaksi antara pemerintah dan masyarakat. Pers merupakan salah satu kekuatan sosial politik antara pemerintah dan masyarakat.<sup>42</sup> Pada masa Demokrasi Terpimpin, pers merupakan suatu kekuatan politik. Pers digunakan pemerintah sebagai alat dari pemerintah untuk menjalankan kebijakan-kebijakan pemerintah dan melakukan indoktrinisasi kepada masyarakat. Presiden sukarno mendesak agar pers mempopulerkan politiknya. Pemerintah melarang semua kritik, kecuali kritik yang

---

<sup>39</sup>Oey Hong Lee, *Indonesian Government and Press*, hlm. 87.

<sup>40</sup>Marwati Djoened Poesponegoro dan Nugroho Notosusanto, *Sejarah Nasional Indonesia Jilid VI: Zaman Jepang dan Zaman Republik Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2008), hlm. 307.

<sup>41</sup>Tribuana Said, *Sejarah Pers Nasional dan Pembangunan Pers Pancasila* (Jakarta: Haji Masagung, 1988), hlm. 90.

<sup>42</sup>Asyari, *Pembredelan Tempo 1994: Wajah Hukum Pers Sebagai Alat Represi Politik Negara Orde Baru* (Jakarta: Pensi 324, 2009) hlm. 29.

konstruktif. Para penerbit surat kabar dan majalah harus menjadi pendukung dan pembelaserta bertindak sebagai alat untuk menyebarkan Manifesto Politik.<sup>43</sup>

Pengkasjian Empirik dari Edward C. Smith telah menunjukkan bahwa dinamika politik di Indonesia telah memberikan suatu corak pada perkembangan pers di Indonesia. Banyak pers yang mengalami pemberedelan pada masa Demokrasi Terpimpin yang menyebabkan pers tersebut tidak terbit lagi. Hal tersebut memperlihatkan bahwa eksistensi dan perkembangan pers sangat berkaitan dengan politik dan kekuasaan. Hal itu juga memperlihatkan bahwa kekuasaan dapat dengan mudah menundukkan pers.

Pada skripsi ini politik yang digunakan adalah politik dalam arti “kebijakan”. Obyek dari ilmu politik adalah kebijakan pemerintah, proses terbentuknya, serta akibat-akibatnya.<sup>44</sup> Pendekatan ini diambil karena dalam skripsi ini membahas mengenai sistem yang diterapkan pemerintah dalam melakukan kontrol terhadap pers. Hal itu bisa terlihat pada kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Kebijakan-kebijakan yang dilakukan kepada pers akan menimbulkan akibat-akibat yang diterima dikalangan pers.

#### **F. Metode penelitian**

Metode penelitian yang digunakan untuk menyusun skripsi ini adalah metode sejarah, yaitu proses menguji dan menganalisis rekaman dan peninggalan masa lampau.<sup>45</sup> Metode yang digunakan mencakup empat tahap, yaitu: pengumpulan sumber (*heuristik*), pengujian sumber (*kritik*), interpretasi, dan penulisan (*historiografi*).

Pada skripsi yang berjudul “Sistem Pengawasan Pers di Indonesia pada Masa Demokrasi Terpimpin 1959-1965” ini sumber-sumber yang digunakan merupakan

---

<sup>43</sup>Smith, *Pemberedelan Pers di Indonesia*, hlm. 197.

<sup>44</sup>Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, hlm. 12.

<sup>45</sup> Luis Gottschalk, *Mengerti Sejarah* (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1983), hlm. 32.

sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer adalah sumber yang berkaitan langsung dengan peristiwa yang diceritakan. Sumber-sumber primer berupa dokumen, foto-foto, dan surat keputusan. Sumber sekunder merupakan sumber tambahan untuk melengkapi data-data yang tidak didapat dari sumber primer, dapat berupa berita tertulis yang dimuat di surat kabar, dan buku-buku atau hasil penelitian-penelitian sebelumnya.

Dalam menelusuri sumber primer, dilakukan penelusuran sumber ke Arsip Nasional Republik Indonesia, Perpustakaan Nasional, Kementerian Informasi dan Informatika Republik Indonesia, Monumen Pers, Perpustakaan Depo Arsip Suara Merdeka Semarang. Sumber sekunder diperoleh melalui studi pustaka terhadap buku-buku karya para sarjana dan ahli yang relevan serta artikel-artikel yang dimuat dalam majalah dan surat kabar sezaman atau bentuk penerbitan lain, penelusuran dilakukan ke beberapa perpustakaan seperti Perpustakaan Jurusan Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro, Perpustakaan Widya Puraya Universitas Diponegoro, Perpustakaan FISIP Universitas Diponegoro, Perpustakaan Daerah Jawa Tengah, Perpustakaan UGM, dan Perpustakaan Nasional Indonesia. Sumber-sumber sekunder digunakan untuk melengkapi sumber-sumber primer dalam rangka memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai peristiwa yang diteliti.

Selanjutnya, tahap kedua adalah melakukan kritik terhadap sumber-sumber tersebut. Kritik sumber ini dibedakan menjadi dua, yakni kritik eksteren dan kritik interen. Kritik eksteren merupakan penilaian terhadap sumber dari aspek fisik dari sumber tersebut.<sup>46</sup> Kritik eksteren menguji ontentisitas (keaslian) suatu sumber, agar diperoleh sumber yang sungguh-sungguh asli dan bukan tiruan atau palsu. Selain dilakukan kritik eksteren juga dilakukan kritik interen. Kritik interen bertujuan untuk memastikan bahwa informasi dalam dokumen itu dapat dipercaya. Dalam hal ini

---

<sup>46</sup>Wasino, *Dari Riset Hingga Tulisan Sejarah* (Semarang: Universitas Negeri Semarang Press, 2007), hlm. 51.

membandingkan informasi satu dengan yang lain dilakukan untuk mendapatkan fakta-fakta sejarah yang dapat dipercaya.

Tahap ketiga adalah kegiatan sintesis atau interpretasi terhadap fakta-fakta yang diperoleh dari proses kritik sumber. Interpretasi merupakan usaha untuk menetapkan hubungan antara fakta-fakta berdasarkan hubungan kronologis dan sebab-akibat dengan melakukan imajinasi dan analisis. Berbagai sumber itu belum bermakna apabila belum dilakukan interpretasi yang meliputi analisis dan sintesis. Tahap ini adalah tahap mengkaitkan antara fakta yang satu dengan fakta yang lainnya. Dalam menetapkan hubungan antar fakta dilakukan serialisasi yang memuat unsur kronologis, kausalitas, dan imajinasi dalam penyusunan fakta-fakta yang ada.<sup>47</sup>

Tahap terakhir dari penelitian sejarah adalah historiografi atau penulisan sejarah. Tahap ini merupakan rekonstruksi imajinatif dari masa lampau berdasarkan data yang diperoleh dengan menempuh proses pengujian dan analisis kritis. Dalam tahap ini fakta-fakta yang sudah melalui proses sintesis dipaparkan dalam bentuk tulisan sejarah dengan menggunakan bahasa yang baik dan benar agar dapat dipahami dengan baik oleh para pembaca.

### **G. Sistematika Penulisan**

Skripsi ini terdiri atas lima bab, yang terdiri atas beberapa subbab. Setiap bab yang satu dan yang lainnya memiliki keterkaitan yang erat.

Bab I adalah Pendahuluan, yang memuat latar belakang dan permasalahan, ruang lingkup, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II berjudul “Pers pada Masa Demokrasi Terpimpin”, yang mencakup pembahasan tentang lahirnya pers terpimpin, jenis-jenis pers, karakter pers sirkulasi surat kabar, dan *trending topic* pemberitaan pers pada masa Demokrasi Terpimpin.

---

<sup>47</sup>Gustaaf Johannes Renier, *Metode dan Manfaat Ilmu Sejarah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997), hlm. 113.

Dalam bab ini terdapat subbab-subbab yaitu pertama tentang proses terbentuknya Pers Terpimpin. Subbab ini berisi pembahasan mengenai tindakan yang dilakukan pemerintah hingga melahirkan Pers Terpimpin. Subbab yang kedua membahas mengenai Jenis Pers pada masa Demokrasi Terpimpin yang berisi pembahasan mengenai jenis pers yaitu pers independen, pers partai, dan pers afiliasi. Subbab ketiga membahas tentang karakter pers pada masa Demokrasi Terpimpin. Subbab ke empat membahas tentang sirkulasi surat kabar di setiap tahunnya. Subbab kelima membahas tentang pemberitaan yang menjadi *trending* pada masa Demokrasi Terpimpin.

Bab III berjudul “Pengawasan Terhadap Pers Pada Masa Demokrasi Terpimpin”, yang terdiri dari subbab pertama yang membahas tentang landasan pelaksanaan pengawasan pers pada masa Demokrasi Terpimpin. Subbab kedua membahas tentang bentuk pengawasan yang dilakukan pada masa Demokrasi Terpimpin. Subbab ketiga membahas tentang realisasi pengawasan terhadap pers, dan subbab keempat membahas tentang pers Badan Pendukung Sukarnoisme yang merupakan suatu organisasi yang diisi oleh kalangan pers dan wartawan yang memiliki kesamaan yaitu menentang gerakan PKI.

Bab IV berjudul “Dampak Pengawasan terhadap Pers pada Masa Demokrasi Terpimpin”. Bab ini berisi pembahasan dampak dampak yang ditimbulkan akibat pengawasan yang dilakukan pemerintah terhadap pers. Subbab pertama membahas tentang pemberedelan terhadap pers Cina. Subbab kedua membahas tentang masa terbit surat kabar karena beberapa tindakan terhadap pers yang membuat banyak pers harus berhenti terbit. Subbab ketiga membahas tentang surat izin pembelian kertas dan subsidi surat kabar yang diterima oleh surat kabar dan majalah pada masa Demokrasi Terpimpin sebagai salah satu solusi untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh pers nasional. Subbab keempat membahas tentang pers harus menyebarkan ajaran yang merupakan kebijakan agar surat kabar dan majalah untuk memuat tulisan tulisan Bung Karno yang asli dalam surat kabar dan majalah pada masa Demokrasi Terpimpin.

Bab V berisi simpulan yang merupakan jawaban dari permasalahan yang diajukan dalam skripsi ini.